# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah yang terletak jauh dari riuhnya perkotaan dan ditempati sekelompok masyarakat dengan sebagian besar mata pencahariannya pada sektor agraris. Masyarakat desa merupakan komunitas yang menetap dalam suatu wilayah yang sama, mempunyai jalinan yang kuat dan saling memengaruhi satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan masyarakat desa memiliki tradisi yang sangat kuat dan kental dengan menjunjung tinggi kepercayaan nenek moyang.

Mengenai pengertian Desa secara tersurat disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa), bahwa:

> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari sisi wewenang, kemunculan UU tentang Desa menempatkan desa sebagai arena pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah. Dalam Undang-Undang ini, desa memiliki otonomi sendiri yaitu memiliki posisi dan peran yang berdaulat serta lebih luas dalam mengatur dan mengurus desa. Lahirnya Undang-Undang ini diharapkan mampu membawa perubahan ke arah pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara penuh dalam rangka pembangunan desa sejalan dengan kearifan lokal dan perundangan yang berlaku.

Pembangunan melalui desa menjadi salah satu agenda penting pemerintah pusat dalam rangka mengembangkan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya UU tentang Desa yang merujuk pada Nawacita Joko Widodo – Jusuf Kalla. Dilansir dari kpu.go.id, poin ketiga Nawacita Joko Widodo – Jusuf Kalla menyebutkan bahwa dalam konsep kerangka negara kesatuan akan membangun Indonesia dari pinggiran dilakukan dengan cara memperkuat daerah-



**Amaliah Utami, 2022**
***PERAN PROGRAM DESA WISATA UNTUK MENGEMBANGKAN PARTISIPASI WARGA NEGARA***
**Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu**

daerah dan desa. Melalui upaya penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat serta upaya memperkokoh pondasi bagi pembangunan nasional, pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di sini jelas bahwa pembangunan desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional, sehingga dapat dikatakan pula bahwa pembangunan desa sebagai ujung tombak atas keberhasilan pembangunan nasional.

Saat ini, sektor pariwisata menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Terlebih lagi sektor ini telah menjadi salah satu program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 selain bidang industri, kemaritiman, energi, serta ekonomi kreatif dan digital (Bappenas, 2019, hlm. 3). Keberagaman seni, budaya, serta alam menjadikan Indonesia negara yang kaya. Kekayaan tersebut menjadi potensi dalam pengembangan pariwisata termasuk pembangunan desa.

Program desa wisata merupakan program yang dibangun oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola kekayaan, baik yang masih menjadi potensi maupun sudah menjadi daya tarik wisata. Sejalan dengan pernyataan Hadiwijoyo (2012), bahwa:

> Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, makanan, minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. (hlm. 67)

Pada konsep tersebut tampak jelas nilai keunikan destinasi yang dimiliki oleh desa wisata, yakni adanya pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat dan sumber daya yang ada di desa. Maka, dalam program desa wisata memerlukan partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi, serta pengawasan.

Dilansir dari laman disparbud.jabarprov.go.id, terdapat beberapa desa wisata yang telah diresmikan sesuai dengan pemenuhan kriteria dan potensi yang dimiliki, di antaranya Desa Wisata Pasanggrahan di Purwakarta, Desa Wisata Sari

Bunihayu di Kabupaten Subang, Desa Wisata Cibuntu di Kabupaten Kuningan, dan Desa Wisata Wangunharja di Kabupaten Subang. Pada penelitian ini, Desa Cibuntu menjadi lokus penelitian karena Kabupaten Kuningan merupakan salah satu wilayah pengembangan pembangunan di Jawa Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yakni masuk pada wilayah Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan).

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Pascasarjana Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti meresmikan Desa Cibuntu sebagai desa wisata. Desa wisata merupakan salah satu bentuk dari *Community Based Tourism* (CBT). Adapun bentuk dari CBT ini dikelola, dimiliki oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga keberadaan desa wisata dapat membantu para wisatawan untuk belajar mengenai masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (Hadiwijoyo, 2012, hlm. 67). Oleh karena itu, dalam pengembangannya desa wisata lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat lokal.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap salah satu pengurus kelompok sadar wisata Desa Cibuntu menuturkan bahwa Desa Cibuntu memiliki beberapa potensi wisata di antaranya Kampung Domba, kaki Gunung Ciremai dan persawahan, mata air dan air terjun, situs-situs purbakala, upacara adat sedekah bumi, pengolahan gerabah, sanggar seni, kolam renang dan *camping ground*, pembuatan kerajinan suling, dan juga *homestay*. Dapat diketahui bahwa Desa Wisata Cibuntu menampilkan konsep kearifan lokal baik dari sisi budaya, kesenian dan alam dengan pengelolaannya berbasiskan pemberdayaan masyarakat.

Di balik keasrian dan keindahan alamnya, desa wisata yang berjarak 30 kilometer dari Kota Cirebon ini merupakan bekas penambangan pasir yang dibiarkan begitu saja oleh penambangnya setelah tidak memiliki nilai ekonomis. Dilansir dari merdeka.com, seorang warga setempat, Awam, selaku Kepala Desa Cibuntu mengungkapkan bahwa:

> Dahulu kawasan tersebut merupakan bekas galian C, meliputi nitrat, fosfat, asbes, talk, grafit, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, marmer, dan pasir. Karena dampak yang ditimbulkan sangat besar, akhirnya masyarakat sepakat untuk memperbaikinya.

Melalui semangat serta kekompakan masyarakatnya, di bawah komando kepala desa, Awam, area bekas pertambangan itu disulap menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik. Hal tersebut menegaskan bahwa Desa Cibuntu memiliki potensi yang unggul dan masyarakatnya mempunyai komitmen yang kuat untuk mengembangkan desa wisata.

Potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Cibuntu menjadikan Desa Cibuntu dinobatkan sebagai desa terbaik urutan lima se-Asia Tenggara pada tahun 2016 untuk bidang *homestay.* Pada tahun 2017, Desa Wisata Cibuntu terpilih sebagai desa wisata terbaik peringkat dua di Indonesia dalam ajang *Community Based Tourism* (CBT) Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan meraih peringkat 1 Lomba Sapta Pesona tingkat Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, yang terbaru pada tahun 2019 meraih penghargaan Green dalam *Indonesia Sustainable Tourism Award* (ISTA) pada kategori Tata Kelola Destinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Keberhasilan Desa Wisata Cibuntu mendapatkan berbagai penghargaan tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan terhadap masyarakat desa telah mengubah masyarakat desa menjadi terampil dan inovatif sehingga dapat memanfaatkan, memperbarui, serta mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Dengan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Cibuntu ini merupakan salah satu upaya pembangunan desa dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Tentu saja dengan potensi yang dimiliki menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung. Hal itu tercermin dari jumlah kunjungan wisatawan berikut ini.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Desa Wisata Cibuntu (2012-2020)**

| Tahun | Jumlah Kunjungan |
|---|---|
| 2012 | 2.457 |
| 2013 | 3.385 |
| 2014 | 5.772 |
| 2015 | 11.276 |
| 2016 | 11.381 |
| 2017 | 32.804 |

| | |
|---|---|
| 2018 | 65.014 |
| 2019 | 42.894 |
| 2020 | 9.282 |

Sumber: Kelompok Sadar Wisata Desa Cibuntu (2021)

Pada tabel 1.1 dapat diketahui pada dua tahun terakhir terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Cibuntu. Berdasarkan keterangan salah satu pengurus kelompok sadar wisata Desa Cibuntu, faktor utama penyebab penurunan kunjungan wisatawan terjadi dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mendukung kebijakan pencegahan Virus Covid-19 di Kabupaten Kuningan yang menyebabkan kapasitas pengunjung dibatasi dan objek wisata sempat ditutup sementara. Sebagai responnya, dibutuhkan pembenahan yang bersifat berkelanjutan agar wisatawan tidak mengalami rasa bosan saat berkunjung dengan tetap mempertahankan nuansa lokal. Oleh karena itu, maka evaluasi Desa Wisata Cibuntu perlu dilakukan untuk terciptanya Desa Wisata Cibuntu yang lebih baik lagi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika, Afriza, dan Fajri (2019) dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangannya Desa Wisata Cibuntu di Kabupaten Kuningan belum dikatakan optimal sebab belum terbangunnya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah. Dengan mengacu pada pola pemberdayaan 7D hasil adaptasi dari Dhamotharan (2009, dalam Kartika, dkk., 2019, hlm. 24), pada tingkat D1 dan D2 masyarakat sudah dapat melaksanakannya dengan baik, sementara pola D3-D7 masih menghadapi beberapa kendala pada tataran implementasinya. Dengan demikian, pola pemberdayaan di Desa Cibuntu masih memerlukan dorongan yang kuat, khususnya dari Pemerintah Desa sebagai unsur yang paling dekat dengan masyarakat.

**Tabel 1.2**

**Model Pola Pemberdayaan 7D**

| No | Tahap | Indikator |
|---|---|---|
| 1 | D1 – *Developing relation* | Masyarakat membangun hubungan |
| 2 | D2 – *Discovering capacities* | Masyarakat mengetahui potensi yang dimiliki |
| 3 | D3 – *Dreaming of community future* | Masyarakat mempunyai cita-cita dan visi yang ingin dicapai |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | D4 – *Directions of community actions* | Masyarakat mempunyai arah tindakan dari apa yang dicita-citakan |
| 5 | D5 – *Designing community actions* | Masyarakat mampu merancang kegiatan dari visi yang sudah dibuat |
| 6 | D6 – *Delivering Planned Activities* | Masyarakat melakukan kegiatan sesuai visi yang telah ditetapkan |
| 7 | D7 – *Documenting Outputs, Outcomes and Learning* | Masyarakat merefleksikan, mendokumentasikan dan mengevaluasi hasil kegiatannya. |

Sumber: Dharmotharan (2009, dalam Kartika, dkk., 2019, hlm. 16-17)

Melihat temuan dari hasil penelitian di atas, terjadinya pengabaian partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah terlihat dominan. Padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan, peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat setempat. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Sejalan dengan pendapat Lubis (2018) dalam skripsinya memberikan komentar:

> Pemberian kesempatan berpartisipasi pada masyarakat bukan hanya sekedar pemberian kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi, pemberian kesempatan berpartisipasi harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat setempat layak diberikan kesempatan karena di samping memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan sebagai sesama warga negara mereka juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun bagi perbaikan mutu hidupnya. (hlm. 4)

Realita ini bertolak belakang dengan apa yang dipaparkan sebelumnya. Mengabaikan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata jelas suatu kekeliruan besar. Hal ini dikarenakan ada banyak kebijakan pariwisata di tingkat lokal yang justru akan lebih efektif bila dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Upaya pengembangan pariwisata di desa idealnya harus bisa menciptakan keuntungan dan manfaat sosio-ekonomis bagi masyarakat lokal (desa).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, partisipatif dan bertanggung jawab. Berbicara tentang Pendidikan Kewarganegaraan, selain di persekolahan Pendidikan

Kewarganegaraan juga dapat dipelajari di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Cogan (1998, dalam Budimansyah & Suryadi, 2008) berkaitan dengan konsep *citizenship education* atau *education for citizenship* diartikan sebagai :

> *The more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organizations, community organizations, the media, etc. which help to shape the totality of citizenship.* (hlm. 5)

Berdasarkan kutipan di atas, *citizenship education* merupakan istilah generik yang mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan, tetapi bentuk-bentuk informal dan non formal pendidikan kewarganegaraan, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Sehubungan dengan itu, guna mendukung keterkaitan konsentrasi ilmu yang sedang penulis tempuh di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maka penelitian ini memiliki fokus pada pendidikan kewarganegaraan secara luas sebagaimana istilah *citizenship education* yang telah diuraikan di atas, khususnya kepada kelompok sadar wisata di Desa Cibuntu yang dimediasi melalui penerapan program desa wisata di daerahnya dalam mengembangkan partisipasi masyarakat sebagai suatu sikap warga negara untuk berkewajiban ikut serta dalam program.

Partisipasi warga negara (*civic participation*) diposisikan dalam paradigma baru dari pada tugas Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana yang dikemukakan oleh Winataputra, dkk. (2016, hlm. 2) yaitu sebagai kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawab baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin di masa mendatang. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian tentang partisipasi warga negara (*civic participation*) khususnya kepada kelompok sadar wisata di Desa Cibuntu sebagai suatu sikap warga negara untuk berkewajiban ikut serta dalam mengelola desa wisata sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bermaksud mengkaji lebih lanjut mengenai peran program pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan yaitu Program Desa Wisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta melestarikan kebudayaan dan lingkungan

alam di daerahnya sehingga mendapatkan manfaat secara sosio-ekonomis melalui pengembangan pariwisata. Maka peneliti merumuskan judul penelitian: "Peran Program Desa Wisata untuk Mengembangkan Partisipasi Warga Negara (Studi Kasus di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan)."

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan pokok penelitian adalah "Bagaimana peran program desa wisata dalam mengembangkan partisipasi warga negara di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan?" Agar pokok permasalahan lebih terperinci, maka penulis menjabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Program-program apa saja yang ada di Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana strategi perencanaan dan pelaksanaan program desa wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana aktualisasi partisipasi warga negara dalam pelaksanaan program desa wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan?
4. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program desa wisata untuk mengembangkan partisipasi warga negara di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran program desa wisata dalam mengembangkan partisipasi warga negara di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui program-program apa saja yang ada di Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.
2. Mengetahui strategi perencanaan dan pelaksanaan program desa wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.

3. Mengetahui aktualisasi partisipasi warga negara dalam pelaksanaan program desa wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.
4. Mengetahui kendala dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program desa wisata untuk mengembangkan partisipasi warga negara di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat dari Segi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya dalam kajian Kebijakan Publik. Selain itu juga tentang pengembangan dan pembangunan partisipasi warga negara (*civic participation*). Sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik (*to be a good citizenship*) termasuk dalam keikutsertaan warga negara guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam pembangunan di Indonesia.

### 1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi baru mengenai implementasi kebijakan pada seluruh elemen yang ada di Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan pemikiran dan analisisnya untuk menanamkan kesadaran bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kuningan memiliki kewajiban yang sama untuk menjalankan program desa wisata dengan sebaik-baiknya.

### 1.4.3 Manfaat dari Segi Praktis

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode studi kasus ke lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung di lapangan mengenai program desa wisata. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman empiris kepada peneliti tentang kondisi *real* mengenai bagaimana implementasi program desa wisata dalam mengembangkan partisipasi warga negara di masyarakat, serta dapat memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap program desa wisata tersebut berdasarkan penerapannya di lapangan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pembuat dan pelaksana

program desa wisata sebagai bahan evaluasi untuk kemudian dijadikan bahan dalam mengembangkan program.

### 1.4.4 Manfaat dari Segi Isu atau Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih di antaranya sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah daerah hingga desa mendahulukan kebijakan yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi warganya untuk ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan di desanya dan sebagai bentuk dorongan kepada masyarakat agar berperan dalam pembangunan desanya.

## 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2019. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dimulai dari halaman judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan bebas plagiarisme, halaman ucapan terima kasih, abstrak, dilanjutkan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Adapun isi dari bagian karya ilmiah berupa skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

a. Bab I Pendahuluan

   Bab ini membahas mengenai 5 (lima) sub judul di antaranya dimulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II Kajian Pustaka

   Pada bab ini berisi berbagai teori yang mendukung penelitian, berbagai pendapat para ahli dan hasil temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan bahan kajian untuk memberikan landasan yang kokoh terhadap pentingnya penelitian yang diteliti.

c. Bab III Metode Penelitian

   Bab ini membahas tentang desain penelitian, lokus penelitian dan partisipan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data dan analisis, uji validitas data, prosedur penelitian, dan ditutup dengan jadwal kegiatan penelitian.

d. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Bab ini akan menyampaikan tentang 2 (dua) hal yang pokok, yakni *pertama*, temuan penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan di lapangan; dan *kedua*, pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

e. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Isi dalam bab ini berupa simpulan umum dan khusus, implikasi dan rekomendasi penelitian berupa berbagai hal pokok dari hasil penelitian yang bisa dimanfaatkan.